

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Kencana, Jakarta, 2009.

Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1993.

Bambang Rudito dkk., *Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi*, Kencana, Jakarta, 2016.

B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009.

Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen, Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Press, Yogyakarta, 2012.

Hatta Ali. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana, Jakarta, 2013.

Hendra Nurtjahjo, *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2001.

Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

- Joko Widodo, *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- M. Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Moh. Mahfud MD., *Ketika Gudang Kehabisan Teori Ekonomi dalam Pemerintahan Yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 1986.
- dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- , *Pemerintahan Menurut Hukum (Wet-en Rechtmatig Bestuur)*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Reza A.A. Watimena, *Melampui Negara Hukum Klasik (Locke – Rousseau – Habermas)*, Yogyakarta, Kanisius, 2007.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang, Yogyakarta, 2008.
- Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Managemen Pemerintahan Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2003.

Sedarmayanti, *Good Governance: Kepemerintahan Yang Baik & Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan Yang Baik*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010.

S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Seri Pustaka Ilmu Administrasi VII, Cetakan Ke-10, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi*.

C. Sumber Lain

A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan*, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 25 April 1992.

Bintan Saragih, *Kapabilitas DPR Dalam Pemantapan Good Governance*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 12-15 Oktober 1999.

- Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Makalah, Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, *Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Komisi Aparatur Sipil Negara, *Rencana Strategis 2015-2019*, Komisi Aparatur Sipil Negara, Jakarta, 2015, hlm. 3., diakses pada situs: https://www.kasn.go.id/www.kasn.go.id/administrator/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=52_d567f9880e91ae1531334b3cb92b69e6.
- Priyatmanto, *Revitalisasi Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara (Revitalitation of Absolute Competency/Jurisdiction of The State Administrative Court)*, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Hasanudin, Makasar, 2014, diakses pada situs: <http://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk1/125/--priyatmant-6224-1-14-priya-h.pdf>.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara, diakses pada situs: <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU5-2014NaskahAkademikRUU-ASN.pdf>.
- Tatang Sudradjat, *Selamat Datang Komisi Aparatur Sipil Negara, Permasalahan. Tantangan dan Harapan untuk Reformasi Birokrasi*, Jurnal Ilmu Administrasi, Volume XI, Nomor 3, Bandung, Desember 2014, hlm. diakses pada situs: <http://stialanbandung.ac.id/ojs/index.php/jia/article/viewFile/58/pdf..>
- Tim Penyusun RUU Aparatur Sipil Negara, *Pokok-Pokok Pikiran RUU Aparatur Sipil Negara*.
- Tim Penyusun, *Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Modul Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kader PNS, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2016, hlm. 1.
- Tyas Dian Anggraeni, *Menciptakan Sistem Pelayanan Publik Yang Baik: Strategi Reformasi Birokrasi Dalam Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 3 No. 3, Desember 2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2000 tentang *Judicial Review* Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.